

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MENYONGSONG ERA TINGGAL LANDAS

Oleh Nurcholish Madjid

Gejala-gejala Peluang dan Penghalang

Berkenaan dengan peluang pembinaan sosial budaya, khususnya di bidang agama, kita dapati fenomena positif bahwa kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat kita yang majemuk semakin membaik. Kalau kita kaji lebih lanjut, fenomena ini merupakan perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika yang semakin mantap, sekaligus menunjukkan bahwa toleransi kehidupan beragama kita juga semakin meningkat. Kecenderungan meningkatnya toleransi ini harus mendapatkan pembinaan lebih lanjut sehingga benar-benar dapat kita jadikan modal dalam membina kerjasama dalam membangun bangsa, mengisi kemerdekaan ini. Sehingga tercipta suasana persahabatan dan persamaan yang akan memperlancar laju Pembangunan Jangka Panjang yang sedang kita laksanakan.

Wujud paling nyata semakin baiknya kehidupan beragama itu sekarang terlihat dari kecenderungan semakin tingginya minat dan gairah pada agama di kalangan generasi muda, lebih-lebih generasi muda terpelajar. Hal ini bisa kita amati pada kehidupan keagamaan di kampus-kampus pendidikan tinggi dan pada aktivitas berbagai perkumpulan remaja masjid. Orde Baru telah berhasil menciptakan iklim keagamaan yang menguntungkan dengan berbagai hasil konkretnya saat ini. Maka, sudah seyogyanya

hasil itu dijadikan landasan pembangunan sumber daya manusia dengan didasari semangat keagamaan. Yaitu pembangunan manusia Indonesia yang “taat menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa” dan memiliki “toleransi dalam kehidupan beragama”. Pembangunan ini bisa terealisasi melalui kegiatan “intensifikasi” pengajaran agama di sekolah-sekolah sampai pada praktik pelaksanaan ibadah dan penyuluhan terhadap juru dakwah (pengkhotbah) tentang pentingnya kerukunan hidup umat beragama tanpa mempertentangkan satu dengan yang lainnya.

Meskipun begitu, tampaknya semua peluang yang menggembirakan tersebut masih perlu ditelaah tentang kemungkinan adanya hakikat lain yang melatarbelakanginya. Jika kita bandingkan dengan gejala serupa di negeri-negeri berpenduduk mayoritas Islam lainnya, tampak bahwa kegairahan hidup beragama di kalangan kaum muda kita mempunyai kaitan dengan dorongan untuk mempunyai pegangan hidup yang kukuh. Dorongan itu sendiri antara lain diakibatkan oleh adanya perasaan ruhani yang goyah karena kehilangan makna hidup dalam suatu masyarakat yang berubah cepat. Perasaan ini timbul sebagai konsekuensi dari proses pembangunan dan modernisasi yang tidak bisa dihindarkan.

Gejala itu ada kaitannya dengan masalah perubahan, baik dalam bentuk perubahan sosial, politik, ekonomi, maupun teknologi. Gejala perubahan ini memang menjadi ciri utama masyarakat maju atau yang sedang menjadi maju. Perubahan dalam masyarakat industrial yang maju—“gelombang kedua”-nya Toffler—adalah suatu “kerutinan”. Sedangkan perubahan dalam masyarakat agraris—“gelombang pertama”-nya Toffler—adalah “keistimewaan”. Selain sebagai hal “yang rutin”, perubahan dalam masyarakat industrial maju berlangsung dengan sangat cepat, mengikuti deret ukur (geometrik), sedangkan dalam masyarakat agraris perubahan itu merupakan hal yang luar biasa, hanya sesekali dan tempo perubahannya sangat lambat mengikuti deret hitung (aritmatika).

Karena kecepatan tempo perubahan itu dan *magnitude* pengaruh langsungnya dalam kehidupan seseorang—misalnya perubahan

akibat introduksi transportasi dan komunikasi modern—maka salah satu problem masyarakat maju adalah adanya krisis yang menimpa mereka yang tidak dapat mengikuti perubahan itu, atau menemui kesulitan dalam menyesuaikan diri. Ini menimbulkan berbagai gejala sosial psikologis yang negatif, seperti dislokasi, deprivasi, disorientasi, dan perasaan “lepas akar” (*uprooted*) dalam budaya. Ini semua dapat menjadi faktor penghalang bagi terwujudnya kehidupan keagamaan yang positif dan konstruktif.

Masalah Fundamentalisme

Gejala-gejala sosial-psikologis sebagai akibat perubahan yang sangat cepat itu dapat dengan mudah dimanipulasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Hal ini disebabkan karena gejala-gejala ini dengan sendirinya diikuti perasaan kecewa, dendam, dan keinginan emosional untuk melawan “kemapanan” (*establishment*). Kemapanan di sini biasanya dianalogikan dengan pemerintah dan kelompok elit penguasa (*ruling elite*).

Tetapi, gejala-gejala tersebut juga dapat memotivasi timbulnya inisiatif dalam mencari faktor pengimbang atau kompensasi. Di negeri kita ini, pencarian faktor pengimbang itu tersalurkan dalam berbagai bentuk, baik negatif maupun positif. Sebagai contoh dari pengimbang yang negatif adalah munculnya sikap-sikap radikal, yang sering dijadikan mediator untuk “mengisi” perasaan hampa tujuan dan makna hidup. Sedangkan contoh yang positif, yang paling menonjol, adalah adanya fenomena kehidupan keagamaan yang semarak.

Kehidupan keagamaan yang semarak itu dengan sendirinya bernilai sangat positif, karena agama itu—sepanjang sejarah umat manusia—memang berfungsi sebagai “tempat simpanan makna” (*repository of meaning*) bagi hampir semua orang. Tetapi, jika ia hanya merupakan “pelarian” dari suatu krisis sosial tertentu, atau jika suatu amalan keagamaan tidak disertai dengan usaha sungguh-

sebenarnya sebagai wahana memahami makna hidup yang hakiki, maka agama menjadi hanya bersifat *palliative*, yaitu memberi hiburan palsu atau bersifat *deceptive* (menipu).

Sikap keagamaan yang *palliative* dapat kita temukan tidak hanya pada bangsa-bangsa kurang maju, bahkan dalam masyarakat maju pun sikap ini menggejala dengan hebat yang terlihat pada fundamentalisme keagamaan. Di Amerika Serikat—suatu negeri yang menjadi asal-mula dan pusat fundamentalisme keagamaan—gejala keagamaan yang negatif itu merupakan akibat langsung dari tidak adanya kemampuan pada pihak agama di sana untuk mengikuti dan memberi makna hakiki pada perubahan sebagai antisipasi adanya proses modernisasi yang cepat. Maka, fundamentalisme di sana mempunyai ciri anti-intelektual yang kental dan banyak mencoba memutarbalik jarum jam kemajuan ilmiah. Ini ditunjukkan antara lain dengan adanya sikap menentang teori evolusi dan hanya berpegang pada teori kreasi secara dogmatis. Sebagai wujudnya, fundamentalisme menawarkan pandangan keagamaan yang serba-sempit, fanatik, dan tidak toleran. Fundamentalisme di sini hanya memahami agama sebagai deretan diktum-diktum mati dan kaku serta simplistik, dan sebagai larangan-larangan tidak rasional, tanpa memberi peluang untuk adanya pertanyaan dan “penanyaan”. Obsesi kaum fundamentalis di sana adalah memaksa orang lain mengikuti kelompok mereka. Rekrutmen anggota baru dilakukan melalui usaha-usaha cuci-otak dan *deprogramming*, untuk menghasilkan *mind set* yang tegar dan taat secara mutlak tanpa sikap kritis. Mereka tidak tertarik pada usaha jujur dan sejati untuk mencari makna hidup.

Karena sikap fanatisme dan eksklusivisme ini, maka kaum fundamentalis selalu menjadi sumber dan pembela tindakan-tindakan anti-sosial. Seperti yang pernah diperlihatkan oleh kelompok-kelompok *People's Temple*, *Yahweh ben Yahweh*, *Christian Identity*, *Children of God*, dan *Jehovah Witnesses*.

Dari gambaran di atas, jika kita dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II nanti benar-benar berhasil mencapai tingkat

perkembangan seperti yang ada pada negeri-negeri maju, maka sebagai konsekuensinya kita harus mengantisipasi terjadinya krisis-krisis sosial budaya seperti gejala fundamentalisme itu. Barangkali memang tetap tersedia jalan untuk menghindari, tetapi jelas memerlukan strategi yang tidak hanya terbatas pada dorongan untuk mempraktikkan ajaran agama dalam arti ritual (ibadat) semata. Melainkan, juga memerlukan strategi untuk mendorong tumbuh-suburnya keinsafan akan makna hidup melalui pemahaman dan apresiasi ajaran keagamaan yang lebih luas dan mendalam. Namun, sebelum masuk dalam pembahasan itu, ada baiknya kita mulai dengan membahas kaitan antara perubahan dan masalah keagamaan sebagai “*repository of meaning*” tersebut.

Masalah Perubahan

Pada “Era Tinggal Landas”, atau pada “Pembangunan Jangka Panjang Tahap II”, atau juga disebut Indonesia “Abad XXI”, jika pembangunan berjalan seperti dikehendaki, maka tempo dan ukuran perubahan akan berlangsung lebih cepat dan lebih besar daripada yang terjadi selama ini. Kita mengetahui bahwa dari segi tingkat pendapatan perkepala, negeri kita masih jauh di bawah beberapa negara tetangga. Lebih-lebih jika kita bandingkan dengan Negeri-negeri Industri Baru (NIB, *NICs*), seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Oleh karena itu, dalam memprediksi tempo dan ukuran perubahan di negara kita ini, lebih tepat menggunakan “kaca mata pandang” suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat dengan tingkat kemakmuran yang lebih rendah.

Di sinilah letaknya problematika yang cukup pelik. Sebab, seperti diungkapkan oleh Margaret Mead, tampaknya merupakan kenyataan yang pahit bahwa kondisi hidup yang paling sengsara pun—dari sudut pandangan negeri-negeri maju—tidak dengan sendirinya membuat perubahan ini dapat diterima. Meskipun

perubahan ini jelas mempunyai tujuan memperbaiki kondisi hidup individu dan masyarakat yang bersangkutan. Kesengsaraan hidup masyarakat juga tidak menjamin bahwa disrupsi dan kegagalan penyesuaian diri tidak akan terjadi segera setelah perubahan teknologis terlaksana. Dari pengalaman berbagai bangsa, khususnya di Negara-negara Industri Baru (*NIC's*), menunjukkan bahwa setelah berhasilnya introduksi suatu perubahn teknologis—yang membawa akibat perbaikan hidup—itu justru disrupsi dan keonaran terjadi. Contoh paling mencolok ialah yang terjadi di Iran. Ini juga dialami—meski relatif lebih kecil—oleh Korea Selatan dan Taiwan.

Berkaitan dengan itu, berkali-kali kita menyaksikan bahwa percobaan untuk menyembuhkan keadaan serupa itu, yang hanya dilakukan melalui penerangan ilmiah dan logika (seperti sering dilakukan *agents of change*) selalu gagal. Kegagalan itu dapat dipahami dengan lebih baik atau diketahui bahwa penjelasan dan penafsiran logis saja sering tidak efektif dalam mengubah tingkah laku, karena penerapan perubahan dan perbaikan itu biasanya terhalang oleh kepuasan emosional yang diperoleh seseorang melalui pola hidup yang sudah ada pada mereka.

Pengetahuan dan teknik yang baru dapat dilaksanakn hanya jika tingkah laku lama, begitu pula sistem nilai dan sikap-sikap lama, dilepaskan; dan tingkah laku yang baru dan lebih cocok, begitu pula sistem nilai dan sikap-sikap yang baru, dipahami dengan baik.

Suatu cara yang efektif untuk mendorong pemahaman tingkah laku dan sikap-sikap yang baru itu adalah dengan mengaitkan (secara segera dan konsisten) suatu bentuk kepuasan tertentu kepada mereka. Ini dapat berbentuk pujian yang konsisten, persetujuan, *privilise*, kedudukan sosial yang lebih baik, integrasi yang lebih kuat dengan kelompok seseorang, atau berupa ganjaran material. Cara ini sangat penting jika perubahan yang dikehendaki ternyata sangat lambat dalam mewujudkan hasil-hasilnya. Sebagai contoh, untuk dapat menghargai suatu perubahan makanan yang menyangkut perbaikan gizi, atau untuk mengakui hasil suatu cara baru bercocok

tanam dan penggunaan bibit baru, memerlukan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, karena hasilnya baru terlihat dalam tenggang waktu yang lama.

Di sini perlu adanya usaha tertentu untuk menutup kesenjangan yang terjadi antara suatu tingkah laku baru dengan hasilnya. Ini harus dilakukan jika kesenjangan itu terindikasi akan tidak menunjang tingkah laku baru, sebelum benar-benar diapresiasi melalui hasilnya. Usaha-usaha ini dapat kita pahami jika kita menyadari bahwa kepuasan untuk masuk ke dalam suatu kelompok sosial tertentu, atau kegembiraan karena menguasai suatu keahlian baru yang dikagumi oleh orang lain, dapat memberi rasa kepuasan (sebagai “ganjaran”) yang segera bisa dirasakan. Dalam keadaan puas itu tingkah laku baru dapat menjadi lebih berakar, minat-minat baru menjadi lebih kuat, tujuan-tujuan baru menjadi lebih kukuh, dan sikap-sikap baru menjadi lebih bersemangat.

Sementara perubahan itu berlangsung, maka kesediaan untuk menerima fakta-fakta baru—yang sekarang dikenal sebagai bagian dari situasi yang melahirkan dari kepuasan tersebut—akan tumbuh lebih subur. Adanya kepuasan ini juga akan memberi peluang adanya perubahan pada sistem nilai, termasuk unsur-unsur (tertentu) pengetahuan, keyakinan, dan pandangan hidup, karena mereka yang terlibat itu menjadi lebih bebas untuk memeriksa fakta-fakta baru tersebut.

Perasaan puas yang terkait dengan suatu tingkah laku yang baru, dapat muncul dengan sengaja atau tidak sengaja. Orang yang belajar menerapkan tingkah laku atau sikap-sikap yang baru mungkin menyadari, mungkin tidak, tentang adanya rasa kepuasan yang terkait dengan itu semua. Dan bentuk atau tingkat rasa puas itu pun dapat bervariasi. Kepuasan itu, jika dialami secara langsung, dengan sendirinya akan memperkuat tingkah laku baru tanpa disadari oleh pelakunya. Dia mungkin tidak lagi tahu bahwa suatu perubahan sedang terjadi. Juga, disebabkan tidak adanya kesadaran tersebut, tidak mesti berarti bahwa dia di masa mendatang akan cenderung mengulangi tindakan yang menghasilkan kepuasan itu.

Tetapi, itu semua hanya menyangkut proses penerimaan perubahan secara praktis dan pragmatis, yang dikaitkan dengan faktor manfaat materiil dan kepuasan menikmati manfaat itu. Meskipun tersangkut pula “ganjaran” sosial budaya seperti perasaan “termasuk” dalam lingkaran sosial baru karena merasa telah berhasil memasuki suatu bentuk kemajuan teknik yang membawa pada perbaikan taraf hidup. Kesemuanya ini memang sangat penting dan realistis, namun itu semua belum menyangkut persoalan makna hidup yang lebih mendalam. Nabi Isa al-Masih, dengan mengutip Deuteronomy, mengatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dengan roti. Psikologi modern, seperti dirintis oleh C.G. Jung, mengatakan bahwa manusia mempunyai non-material yang lebih mendasar, lebih mendalam, dan lebih penting dari kebutuhan material, seperti pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan non-material manusia itu yang paling utama adalah rasa memiliki makna hidup. Dan rasa memiliki makna hidup itulah—bukannya yang lain mana pun—yang membedakan spesies manusia dari genus hewan pada umumnya.

Human dignity rests on the assumption that human life is in some way significant. We are more prepared to endure pain, deprivation, anguish, and all manner of ills, if they serve some purpose, than we are to endure the inconsequential. We would rather suffer than be of no importance.¹

(Harkat manusia terletak pada pandangan bahwa hidupnya itu bagaimana pun berguna. Kita bersedia menanggung kepedihan, deprivasi, kesedihan, dan segala derita, jika semuanya itu menunjang suatu tujuan, daripada memikul beban hidup tak berarti. Lebih baik menderita daripada tanpa makna).

¹ Michael Baigent, Richard Leigh, & Henry Lincoln, *The Messianic Legacy* (New York, 1986), h. 137

Oleh karena itu, justru demi suksesnya perubahan positif secara mendasar dalam jangka panjang, rasa memiliki makna hidup itu mutlak harus diperhatikan.

Membentuk Masyarakat Berketuhanan Yang Mahaesa

Dalam mengantisipasi adanya dampak perubahan ini, kita tidak cukup hanya melakukan pendekatan secara praktis dan pragmatis. Peningkatan pembangunan kelembagaan sosial budaya yang justru akan mendukung perubahan yang positif dapat kita lakukan jika kita memahami dengan baik problematika perubahan dalam kaitannya dengan kenyataan-kenyataan sosial budaya itu. Dan karena dalam hubungan sistemik-sibernetik antara budaya dan kemasyarakatan budaya selalu lebih menentukan—disebabkan fungsinya sebagai kerangka acuan hidup yang bersifat menyeluruh—maka perhatian harus lebih kita arahkan pada problematika perubahan dalam kaitannya dengan wujud-wujud budaya.

Biasanya, perangai, kepercayaan, dan tingkah laku seseorang tumbuh dan berubah hanya sampai batas minimal sesuai dengan tuntutan situasi yang terdekat dalam hidupnya. Yang diperlukan di sini adalah bahwa perangai dan persepsi hariannya harus utuh dan mempunyai makna. Kadang-kadang sebuah persepsi sangat tergantung pada sejumlah dasar kepercayaan yang asasi, yang tidak memungkinkan bagi suatu perbuatan untuk diubah tanpa mengubah seluruh susunan kepercayaan itu. Sebab, bagi setiap masyarakat, budaya itu merupakan suatu kesatuan yang hidup, sehingga adanya perubahan dalam suatu aspek mana pun akan mempunyai dampak pada aspek-aspek yang lain.

Karena setiap individu cenderung berkehendak mewujudkan budaya, yang dengan budaya itu dia hidup, maka kesenjangan, penyimpangan, dan perbedaan laju perubahan pada bagian-bagian budaya itu akan mempunyai dampak dalam susunan kepribadian individu-individu yang hidup dalam budaya yang sedang mengalami

perubahan tersebut. Oleh karena itu, perubahan yang sangat cepat—yang tidak terkejar oleh masyarakat atau individu-individu tertentu—akan mengakibatkan permasalahan sosial-psikologis seperti dislokasi, disorientasi, dan deprivasi relatif. Sebagaimana telah disebutkan di muka, permasalahan sosial-psikologis ini menjadi sumber kekecewaan dan perasaan “anti kemapanan” dalam masyarakat, yang pada urutannya juga menjadi sumber munculnya sikap-sikap dan tindakan-tindakan “anti-sosial”.

Oleh karena setiap budaya memiliki sesuatu yang unik, dan karena setiap situasi yang menjadi “latar” suatu perubahan yang sedang berlangsung atau yang sedang direncanakan adalah juga unik, maka tidak mungkin bagi kita meletakkan resep tentang apa yang harus diperbuat dalam setiap kasus perubahan. Tetapi, semua perubahan jelas harus dilaksanakan dengan persetujuan dan partisipasi mereka yang kehidupan sehari-harinya akan terpengaruh oleh perubahan itu.

Sebagai konsekuensi dari tekad bangsa kita yang ingin mempertahankan dan melaksanakan Pancasila, maka nilai-nilai Pancasila itulah yang harus kita kembangkan dalam mewujudkan pembangunan kelembagaannya. Pembangunan kelembagaan itu akan mempunyai makna substansiasi konkret dari nilai-nilai Pancasila dan sekaligus menjadi kerangka acuan utama bagi bangsa kita dalam melakukan perubahan dan dalam menghadapi permasalahan yang timbul oleh adanya perubahan itu. Ini sejalan dengan kebijaksanaan dan implementasi strategi pembangunan sumber daya manusia di bidang sosial budaya, yaitu “upaya pembentukan manusia yang Berketuhanan Yang Mahaesa”.

Jika ungkapan “manusia yang ber-Ketuhanan Yang Mahaesa” itu kita tukar dengan beberapa istilah teknis keagamaan yang umum dikenal di negeri kita, maka pengertian dan semangatnya adalah sama dengan “berkeimanan” dan “berketakwaan”. Atau, lebih sederhana, “beriman” dan “bertakwa”. Dari sudut pandangan sistem paham keagamaan, iman dan takwa adalah pondasi (Arab: *asās*, “asas”) yang benar bagi semua segi kehidupan manusia.

Sebab, “ber-Ketuhanan Yang Mahaesa” atau iman dan takwa itu mempunyai implikasi dan ramifikasi yang luas. Implikasi dan ramifikasi Ketuhanan Yang Mahaesa itu, jika kita coba untuk mengidentifikasinya, kurang lebih akan menghasilkan nilai-nilai berikut ini:

1. Bahwa manusia tidak dibenarkan memutlakkan sesuatu apa pun selain Tuhan Yang Mahaesa itu sendiri. Mengakui Tuhan Yang Mahaesa sebagai yang mutlak berarti menyadari bahwa Tuhan tidak dapat dijangkau oleh akal manusia.
2. Maka, Tuhan tidak dapat diketahui, tetapi harus diinsafi se-dalam-dalamnya bahwa Dia-lah asal dan tujuan hidup. Sebagai konsekuensinya, manusia harus membaktikan seluruh hidupnya demi memperoleh perkenan atau rida dari Tuhan.
3. Tidak memutlakkan sesuatu apa pun selain Tuhan Yang Mahaesa berarti tidak menjadikan sesuatu selain dari Dia sebagai tujuan hidup. Dalam wujudnya yang minimal, menjadikan sesuatu selain Tuhan sebagai tujuan hidup itu, contohnya adalah sikap pamrih, tidak ikhlas.
4. Pandangan hidup itu terkait erat dengan pandangan bahwa manusia adalah puncak ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan dalam sebaik-baik kejadian. Manusia berkedudukan lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan mana pun di seluruh alam, malah lebih tinggi daripada alam itu sendiri.
5. Jadi, Tuhan telah memberi kemuliaan kepada manusia. Maka manusia harus menjaga harkat dan martabatnya itu, dengan tidak bersikap menempatkan alam atau gejala alam lebih tinggi daripada dirinya sendiri (melalui mitologi alam atau gejalanya), atau menempatkan seseorang, termasuk juga diri sendiri, lebih tinggi daripada orang lain (melalui tirani atau mitologi sesama manusia).
6. Manusia diciptakan sebagai makhluk kebaikan (*fithrah*), karena itu masing-masing pribadi manusia harus berpandangan baik kepada sesamanya dan berbuat baik untuk sesamanya.

7. Sebagai ciptaan yang kedudukannya lebih rendah daripada manusia, alam ini disediakan Tuhan bagi kepentingan manusia untuk kesejahteraan hidupnya, baik yang bersifat spiritual, maupun yang bersifat material.
8. Alam diciptakan Tuhan sebagai wujud yang baik dan nyata (tidak semu), dan dengan hukum-hukumnya yang tetap, baik yang berlaku dalam keseluruhannya yang utuh maupun yang berlaku dalam bagiannya secara spesifik.
9. Maka, manusia harus mengamati alam raya ini dengan penuh apresiasi, baik dalam kaitannya dengan keseluruhannya yang utuh maupun dalam kaitannya dengan bagiannya yang tertentu, semuanya sebagai “manifestasi” Tuhan (perkataan Arab “*‘alam*” memang bermakna asal “manifestasi”). Dengan apresiasi ini kita dapat menghayati keagungan Tuhan Yang Mahaesa (yang menjadi dasar kesejahteraan spiritual).
10. Juga dengan memperhatikan alam itu—terutama gejala spesifiknya—manusia dapat menemukan patokan dalam usaha memanfaatkannya (dasar kesejahteraan material, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi).
11. Maka, manusia mengemban tugas membangun dunia ini dan memeliharanya sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam keseluruhannya secara utuh (tidak hanya dalam bagiannya secara parsial semata), demi usaha mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi. Di sini letak relevansi keimanan untuk wawasan lingkungan.
12. Di atas segala-galanya, manusia harus senantiasa berusaha menjaga konsistensi dan keutuhan orientasi hidupnya yang luhur, yaitu orientasi menuju rida Tuhan Yang Mahaesa. Ini bisa dilakukan melalui usaha memelihara hubungan dengan Tuhan, dan dengan perbuatan baik pada sesama manusia.
13. Perbuatan baik kepada sesama manusia, yang dilakukan dengan tetap konsisten pada tujuan luhur yang murni, adalah jalan terdekat menuju rida Tuhan. Perbuatan ini bukan semata-mata dengan mengikuti dan menjalankan segi-segi

formal lahiriah ajaran agama, seperti ritus dan sakramen (simbolisme tanpa substansi adalah *muspra* [tidak ada manfaat yang ditinggalkannya], jika bukannya merupakan suatu kesesatan).

14. Karena itu manusia harus bekerja dengan sebaik-baiknya, sesuai bidang masing-masing, menggunakan setiap waktu lowong secara produktif dan senantiasa berusaha menanamkan kesadaran ketuhanan dalam dirinya. Manusia dalam pandangan Tuhan tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan sendiri, tanpa menanggung kesalahan orang lain.
15. Manusia harus menyadari bahwa semua perbuatannya, baik dan buruk, besar dan kecil, akan dipertanggungjawabkan dalam Pengadilan Ilahi di Hari Kemudian. Pada hari itu manusia akan menghadapi Hakim Mahaagung mutlak sebagai pribadi, sebagaimana dia adalah seorang pribadi ketika Tuhan menciptakannya pertama kali.
16. Karena adanya iman ini, manusia menjadi bebas dan memiliki dirinya sendiri secara utuh (tidak mengalami fragmentasi). Sebab, dia tidak tunduk kepada apa pun selain kepada Sang Kebenaran (*al-Haqq*, yaitu Tuhan). Ini dinyatakan dalam kegiatan ibadah yang hanya ditujukan kepada Tuhan semata, tidak sedikit pun kepada yang lain. Proyeksi ibadah yang hanya tertuju kepada Tuhan ini dilandasi rasa sadar akan Kemahaagungan Tuhan.
17. Dengan iman itu manusia akan menjalankan hidupnya penuh tanggung jawab, karena sadar akan adanya Pengadilan Ilahi itu kelak. Sebagai wujud amaliahnya dinyatakan dalam sikap memelihara hubungan yang sebaik-baiknya dengan sesama manusia dalam bentuk rasa persaudaraan, saling menghargai, tenggang-menenggang, dan saling membantu. Sikap ini dilandasi rasa sadar akan makna penting usaha menyebarkan perdamaian (*salām*) antara sesamanya.
18. Maka, perbedaan antara sesama manusia harus disadari sebagai ketentuan Tuhan, karena Dia tidak menghendaki terjadinya

susunan masyarakat yang monolitik. Pluralitas yang sehat justru diperlukan sebagai kerangka adanya kompetisi ke arah berbagai kebaikan, sehingga perbedaan yang sehat merupakan rahmat bagi manusia.

19. Yang melandasi semuanya itu adalah keyakinan dan kesadaran bahwa Tuhan adalah Mahahadir, menyertai dan bersama setiap individu di mana pun dia berada, dan Mahatahu akan segala perbuatan individu itu serta tidak akan lengah sedikit pun untuk memperhitungkan amal perbuatannya, biar sekecil apa pun.

Nuktah-nuktah normatif itu ada dalam agama, dan semuanya mempunyai referensi dalam sumber-sumber suci agama. Oleh karena itu, masalahnya adalah bagaimana mengaktualkan semuanya itu dengan kuat, sehingga menjadi kesadaran umum dan mendalam bagi setiap pemeluk agama tersebut. Jika nilai-nilai Ketuhanan Yang Mahaesa yang menjadi inti ajaran agama itu menjadi kesadaran umum, maka berbagai tujuan strategi Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, akan memiliki landasan spiritual dan moral yang kukuh.

Harapan-harapan

Sekarang, yang sangat penting untuk diperhatikan adalah masalah, bagaimana agar “taat menjalankan agama” tidak berhenti dan terbatas hanya pada pelaksanaan segi-segi formal simbolik, seperti ibadah, ritual, dan sakramen. Tetapi, sikap “taat” ini harus ditindaklanjuti dengan amal perbuatan atas dasar kesadaran mendalam dan menyeluruh akan makna dan semangat ajaran agama itu. Simbolisme memang penting, dan tidak ada individu atau masyarakat yang dapat hidup tanpa simbol-simbol tertentu, karena simbol-simbol itu pada hakikatnya adalah bentuk penyederhanaan permasalahan sehingga dapat dipahami dengan mudah. Tetapi jika

simbol menjadi mutlak, dan makna di balik simbol itu terlupakan, maka hal itu berarti menukar tujuan dengan alat, mengganti yang intrinsik dengan yang instrumental.

Oleh karena itu, harus diusahakan penataan kembali, sedikit demi sedikit, susunan dan hirarki nilai dalam agama sehingga yang primer tetap primer, dan yang sekunder tetap sekunder, begitu seterusnya. Kondisi ini diperlukan agar tidak terjadi kekacauan dan pertukaran hirarki nilai. Ini bukan berarti kita harus merombak, mengubah, dan menukar ajaran dan nilai agama (dan budaya), karena, sepanjang mengenai agama, manusia tidak berhak melakukan suatu perubahan apa pun yang datang dari Tuhan. Tetapi, karena persepsi dan pemahaman terhadap agama ada dalam lingkungan budaya ciptaan manusia, maka adalah suatu hal yang mustahil bahwa persepsi dan pemahaman itu tidak terpengaruhi oleh kerangka dan sistem budaya ciptaan manusia itu. Maka, yang diperlukan di sini adalah sekadar penyusunan kembali urutan hirarkis nilai-nilai itu secara proporsional.

Karena itu selalu ada tantangan, dari zaman ke zaman, untuk bertanya dan mempertanyakan, bagian yang mana dari suatu paham keagamaan dalam masyarakat itu yang benar-benar “asli” berasal dari agama bersangkutan, dan bagian mana pula yang merupakan produk budaya manusia. Juga dari zaman ke zaman, selalu ada usaha untuk memberi tafsiran baru dan pengertian yang lebih segar serta relevan terhadap nuktah-nuktah tertentu agama sebagai sistem simbolik. Dengan pengenalan mana yang “asli” ini akan diperoleh rasa keabsahan dan otentisitas, dan dengan kemampuan memberi tafsiran baru yang segar dan relevan diperoleh kreativitas pemikiran. [❖]